

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN  
MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH  
(STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. INHIL)**

**YUSRIWARTI<sup>1</sup>**

*Universitas Islam Indragiri Tembilahan*

Email: [yusriwarti9@gmail.com](mailto:yusriwarti9@gmail.com)

**NOVRIANI SUSANTI<sup>2</sup>**

*Universitas Islam Indragiri*

Email : [novrianisusanti95@gmail.com](mailto:novrianisusanti95@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the application of accrual-based government accounting standards, internal control systems and work motivation on the quality of regional financial reports. The population in this study is the OPD in Indragiri Hilir Regency, amounting to 33 Regional Apparatus Organizations. The sample selection was carried out using purposive sampling method, with a sample of 66 people consisting of the financial treasurer and the head of the finance sub-section. However, of the 66 samples, only 46 samples could be used for this study. The data analysis method used in this study is multiple linear regression. The results of this study indicate that the accrual-based SAP application has a significant effect on the quality of regional financial reports, the internal control system does not significantly affect the quality of regional financial reports and work motivation does not significantly affect the quality of regional financial reports. Simultaneously it can be concluded that the variables of accrual-based SAP implementation, internal control system and work motivation affect the quality of regional financial reports.*

**Keywords:** *Accrual-Based SAP Implementation, Internal Control System, Work Motivation, Financial Report Quality.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD di Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 33 Organisasi Perangkat Daerah. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan jumlah sampel 66 orang yang terdiri dari bendahara keuangan dan kepala sub bagian keuangan. Namun dari 66 sampel tersebut hanya 46 sampel yang dapat digunakan untuk penelitian ini. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan motivasi kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan SAP berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

**Kata Kunci :** *Penerapan SAP Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern, Motivasi Kerja, Kualitas Laporan Keuangan.*

**1. PENDAHULUAN**

Salah satu isu yang sangat penting dalam bidang akuntansi pemerintahan adalah terkait dengan hasil laporan keuangan yang dihasilkan atau disajikan masih jauh dari kata transparansi dan juga masih terdapat kesalahan-kesalahan penyusunan yang mengakibatkan tidak layaknya laporan keuangan yang dihasilkan. Maka dari itu, diperlukannya suatu pengembangan terhadap kebijakan akuntansi pemerintahan berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (PP No. 71 Tahun 2010) dengan harapan terciptanya sistem pelaporan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini karena pemerintah memegang tanggungjawab terkait kinerja keuangannya kepada publik yang membuat pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Maka dari itu dengan terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 tersebut mengubah sistem akuntansi yang semula menggunakan basis kas menuju akrual mengalami perubahan menjadi sistem akuntansi berbasis akrual dan kemudian disempurnakan lagi oleh

*Yusriwarti-Susanti, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*

Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dengan amanat dari PP No. 71 tahun 2010 tersebut, maka pemerintah pusat dan daerah harus mampu menyajikan dan menyusun laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan basis akrual (Rahmawati, 2016).

Seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, yang semula Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perubahan peraturan ini membuat organisasi sektor publik untuk terus berupaya melakukan pembenahan dalam pengelolaan sumber daya publik agar informasi yang diberikan dalam laporan keuangan juga dapat memenuhi kualitasnya. Laporan keuangan tidak dapat dikatakan berkualitas jika laporan tersebut tidak berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan. Berkualitasnya suatu laporan keuangan tentu memiliki karakteristiknya terdapat 4 karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. laporan keuangan juga harus disusun secara tepat waktu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, hal ini karena organisasi sektor publik memegang tanggung jawab yang besar dalam menyusun laporan keuangan.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam pelaporan akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh *IFAC Public Sector Committee* dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2014 menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Terdapat perbedaan antara standar basis kas dengan standar basis akrual. Standar akuntansi berbasis kas sendiri hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas. Sedangkan standar akuntansi berbasis akrual, selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah utang dan piutang. Sistem berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan pemerintah daerah atau kota daripada sistem berbasis kas. Selain itu, basis akrual mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian, berbeda dengan basis kas dimana pembayaran hanya dicatat jika terjadinya transaksi. Rahmawati (2016), bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi kekurangan basis kas dalam memberikan data yang lebih akurat. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak hanya sekedar basis kas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Tujuan dari SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkualitasnya laporan keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan melalui seberapa baik dan bagusnya pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah. Jika semakin baik pengendalian internalnya, maka akan memberikan dampak yang tinggi bagi suatu institusi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang tentunya berkualitas untuk disajikan. Sehingga tentu dalam pelaksanaan kegiatannya, pemerintah daerah harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan terarah. Jika sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah kurang baik, tentu akan meningkatkan berbagai macam kasus yang akan merugikan negara seperti kasus penyelewengan, korupsi, penyalahgunaan keuangan negara, pemborosan anggaran, dan penyajian laporan keuangan yang buruk atau tidak berkualitas (Widari & Sutrisno, 2017).

Dari Fenomena yang terjadi terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 542 LKPD yang dilaporkan dalam Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019, mengungkapkan bahwa terdapat 514 kelemahan SPI; (a) Pada sektor pengelolaan pendapatan daerah terdiri atas 46 permasalahan pelaksanaan kebijakan, 26 permasalahan SOP yang tidak lengkap, 13 mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan, 33 lain-lain kelemahan SPI, (b) Pada sektor pengelolaan belanja daerah terdiri atas 29 perencanaan kegiatan tidak memadai, 21 penyimpangan terhadap peraturan pendapatan dan belanja daerah, 13 pelaksanaan kebijakan menyebabkan peningkatan belanja, 23 lain-lain kelemahan SPI, (c) Pada sektor pengelolaan aset terdiri atas 32 pencatatan tidak akurat/belum dilakukan, 12 pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, 12 kelemahan pengelolaan fisik aset, 32 lain-lain kelemahan SPI. Dengan banyaknya permasalahan di sistem pengendalian intern (SPI) maka oleh BPK direkomendasikanlah solusi

untuk mengatasi hal ini yaitu dengan memerintahkan KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah.

Salah satu faktor penentu lainnya yang dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah motivasi kerja. Motivasi kerja sendiri sangat dibutuhkan karena mampu membuat para pegawai terdorong untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Terlebih dalam lingkup pemerintahan yang dimana merupakan pelayan masyarakat, seorang pegawai publik tentunya membutuhkan motivasi kerja yang tepat, agar nantinya bisa menghasilkan kinerja yang optimal dalam melayani publik (Mulyani, 2017).

Setiawan & Gayatri (2017), motivasi merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang karena tanpa adanya motivasi untuk bekerja atau motivasi untuk memperoleh tujuan tertentu, maka sulit untuk menyelesaikan ataupun memperoleh tujuan yang diinginkan. Motivasi merupakan faktor penting dalam setiap pegawai untuk mencapai hasil kerja yang efektif. Motivasi diartikan juga sebagai suatu kekuatan yang mengarahkan perilaku manusia. Motivasi sebagai faktor yang memberikan dorongan atau semangat kepada seseorang untuk mengambil suatu keputusan yang dikehendaki. Motivasi kerja di dalam pemerintahan lebih diarahkan untuk memberikan kekuatan dan dorongan dalam diri seorang pegawai yang akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pelayanan publik. Pemberian motivasi yang tepat kepada para pegawai akan menghasilkan kinerja yang optimal untuk melayani publik (Wahyuni, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan SAP berbasis akrual, sistem pengendalian intern, dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah OPD di Kabupaten Inhil?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Penggunaan teori keagenan sendiri telah dipergunakan secara luas baik di sektor privat maupun sektor publik. Para ekonom menggunakan struktur hubungan *principal* dan *agent* untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan pekerja (Faria, 2013). Sementara di sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan *principal-agent* dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Abdullah, 2012).

Dalam sebuah hubungan antara *principal* (masyarakat) dengan *agent* (pemerintah) sering ditemukan adanya pertentangan dan tarik-menarik kepentingan sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang dikenal sebagai *Asymmetric Information* (AI). *Asymmetric information* sendiri adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*. Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI yang tinggi menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri. Dengan adanya hal tersebut, dalam praktik pelaporan keuangan sering menimbulkan ketidaktransparanan yang dapat menimbulkan konflik *principal* dan *agent*.

### 2.2 Teori Akuntabilitas

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good corporate governance*), telah mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dari instansi bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Udoyono (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan pada kegiatan, dalam hal ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Menurut Mahmudi (2011), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan tonggak utama keberhasilan pemerintah dalam menerapkan GCG.

### 2.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan. Ketika Badan Pengawas Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Dalam laporan keuangan pemerintahan faktanya, masih banyak disajikan atau dilaporkan dengan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan (Indriasari, 2008).

Oleh karena itu laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. (Nordiawan, 2010) Terdapat ada 4 (empat) karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (Tanjung, 2012). Menurut Mardiasmo (2016), pola pertanggungjawaban pemerintah daerah saat ini lebih bersifat horizontal (pemerintah daerah bertanggungjawab kepada DPRD maupun pada masyarakat). Namun pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan dan materialistik (Mardiasmo, 2016).

#### **2.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menerapkan SAP berbasis akrual mulai tahun anggaran 2015. Tujuan utama penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selanjutnya peningkatan kualitas informasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bagi para pemangku kepentingan entitas pemerintah daerah dalam menilai akuntabilitas dan transparansi serta membuat berbagai keputusan terhadap suatu entitas pemerintah daerah.

Dari segi transparansi dan akuntabilitas, akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan lebih akuntabel apabila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Hal itu disebabkan karena dalam akuntansi berbasis akrual seluruh beban yang terjadi baik yang sudah dibayar maupun belum dibayar dicatat dan diakui. Dengan demikian akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan perhitungan biaya pelayanan publik yang lebih wajar. Pada sisi yang lain, akuntansi berbasis akrual juga dapat menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik. Hal itu disebabkan karena akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan informasi tentang penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya serta menyajikan pengungkapan kewajiban di masa yang akan datang (Kiranayanti, 2016).

#### **2.5 Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern memegang peranan kunci dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Kelemahan sistem keuangan pada instansi pemerintah selama ini terjadi karena lemahnya desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern (Wasirto, 2010). Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan panduan mengenai desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang berlaku di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60 Tahun 2008).

SPIP dilaksanakan dengan menitikberatkan pada lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur SPIP menjadi fokus yang harus diperhatikan bagi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan baik itu tujuan umum instansi, tujuan unit dan tujuan tingkat kegiatan.

#### **2.6 Motivasi Kerja**

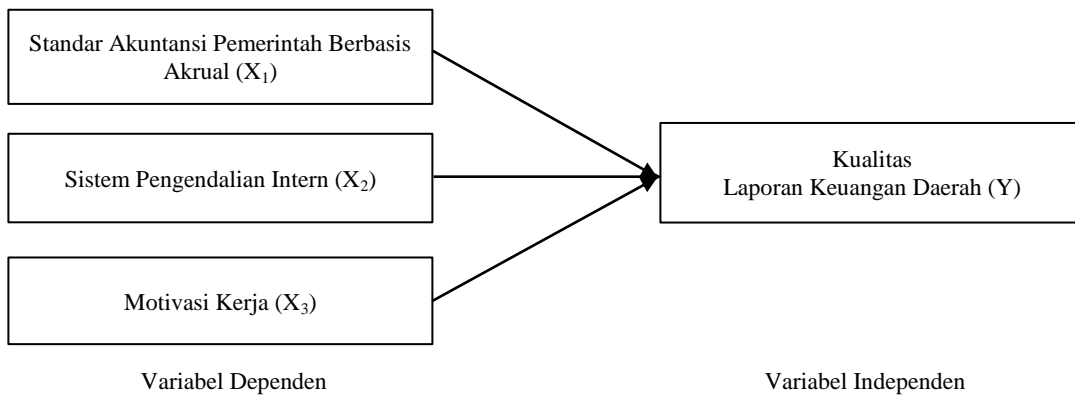
Motivasi kerja merupakan motor penggerak yang paling vital dalam sebuah pencapaian kinerja. Tanpa motivasi pegawai tidak akan berhasil untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan secara maksimal karena tidak ada kemauan yang berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri, yang muncul hanyalah rutinitas. Motivasi yang ada pada diri seseorang merupakan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Oleh karena itu, setiap orang berusaha mengembangkan pola motivasi tertentu sebagai hasil penyerapan dari lingkungan tempat orang itu hidup. Pola ini berupa kebutuhan-kebutuhan yang mempengaruhi cara seseorang

dalam memandang pekerjaan dan menjalani kehidupannya. Menurut Pratama (2013), terdapat tiga kebutuhan yang sangat penting dalam motivasi kerja, yaitu prestasi, afiliasi dan kekuasaan.

Motivasi kerja di dalam organisasi sektor publik lebih diarahkan untuk memberikan kekuatan dan dorongan dalam diri seorang pegawai yang akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pelayanan publik. Pemberian motivasi yang tepat kepada para pegawai akan menghasilkan kinerja yang optimal untuk melayani publik. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh aparatur pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan profesionalisme, etos kerja tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang bebas dari nuansa KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

**2.7 Kerangka Pemikiran**

**Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran**



**2.8 Hipotesa**

- H1 : Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- H2 : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- H3 : Motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- H4 : Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1 Lokasi dan objek penelitian**

Objek penelitian ini adalah mengkaji secara dalam tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerjaterhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)

**3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 33 OPD. Pemilihan sampel ditentukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang dipilih untuk menjadi sampel adalah :

1. Responden dalam penelitian ini adalah Bendahara Keuangan dan juga Kepala Sub-Bagian Keuangan dari tiap-tiap OPD yang ada di Kabupaten Inhil selaku pemegang dan pengambil keputusan dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah.
2. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan dengan anggapan bahwa dalam masa periode tersebut sudah memiliki pengalaman.
3. Pendidikan para responden minimal berada pada tingkatan SMA/SMK sederajat.
4. Pernah mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

### 3.3 Prosedur Penelitian dan Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer. Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner dan membagikan kuesioner kepada responden guna mendapatkan keterangan agar penelitian ini dapat diteliti secara baik serta berjalan dengan lancar. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*.

### 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 1. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ( $X_1$ )

Menurut PP 71 tahun 2010, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pada SAP berbasis akrual, pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas diakui dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah pengakuan pendapatan, pengakuan beban, pengakuan aset, pengakuan utang dan pengakuan ekuitas.

#### 2. Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ )

Menurut PP 60 tahun 2008 sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini variabel diukur melalui unsur-unsur SPI sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

#### 3. Motivasi Kerja ( $X_3$ )

Motivasi kerja adalah suatu dorongan atau semangat untuk bekerja dikarenakan adanya kebutuhan yang mencakup aspek-aspek tertentu yang membuat diri seseorang melakukan rencana, membuat konsep, menyusun strategi, dan mengimplementasikannya melalui tindakan dengan penuh semangat yang tinggi dalam rangka mencapai kebutuhannya tersebut. Dalam penelitian ini variabel diukur dari pernyataan responden tentang kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan dan kebutuhan afiliasi.

#### 4. Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Kualitas laporan keuangan adalah suatu penilaian mengenai baik atau buruknya hasil dari laporan keuangan, dimana penilaian ini dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik tertentu. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan. Dalam penelitian ini variabel diukur dengan karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan PP 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data yang pengukurannya menggunakan uji validitas dan uji realibilitas, metode uji asumsi klasik yang pengukurannya menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan metode analisis regresi linear berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 \beta_2$  : Koefisien regresi

$X_1$  : Penyajian laporan keuangan

$X_2$  : Aksesibilitas Laporan keuangan

$\varepsilon$  : *error*

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 1. Uji Kualitas Data

##### a. Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur sah atau valid suatu kuesioner. Dalam penelitian ini nilai r hitung > r tabel, yaitu hasil dari total korelasi setiap pernyataan lebih besar dari 0,244. Dengan demikian, semua butir pernyataan dalam kuesioner adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6, sedangkan suatu variabel dikatakan tidak reliabel jika menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* < 0,6 (Sulistyo, 2010).

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Standard	Keterangan
SAP Berbasis Akrua	0,804	0,600	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,828	0,600	Reliabel
Motivasi Kerja	0,622	0,600	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0,857	0,600	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Pada tabel di atas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* terhadap variabel SAP berbasis akrual adalah sebesar (0,804), sistem pengendalian intern sebesar (0,828), motivasi kerja sebesar (0,622) dan kualitas laporan keuangan sebesar (0,857). Dari 4 variabel yang diteliti yakni standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem pengendalian intern, motivasi kerja dan kualitas laporan keuangan bisa dikatakan reliabel karena memiliki nilai > 0,6.

2. Uji Hipotesa

a. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	29.783	7.565		3.937	.000		
SAP Berbasis Akrua	.994	.308	.485	3.242	.002	.567	1.763
Sistem Pengendalian Intern	.273	.202	.204	1.358	.182	.560	1.785
Motivasi Kerja	.430	.234	.209	1.843	.072	.983	1.017

a. *Dependent Variable:* Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Dari tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 29,783 + 0,994 X_1 + 0,273 X_2 + 0,430 X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan dan tabel diatas maka dapat hasil uji parsial adalah sebagai berikut:

1. SAP Berbasis Akrua memiliki nilai  $t_{hitung}$  3,242 sedangkan  $t_{tabel}$  2,018. Sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (3,242>2,018) dengan signifikansi untuk variabel SAP Berbasis Akrua 0,002 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial variabel dari penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
2. Sistem pengendalian intern memiliki nilai  $t_{hitung}$  1,358 sedangkan  $t_{tabel}$  2,018. Sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (1,358<2,018) dengan signifikansi untuk variabel sistem pengendalian intern 0,182 yang artinya lebih besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga bisa dikatakan bahwa  $H_2$  ditolak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa secara parsial sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Motivasi kerja memiliki nilai  $t_{hitung}$  1,843 sedangkan  $t_{tabel}$  2,018. Sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (1,843<2,018) dengan signifikansi untuk variabel motivasi kerja 0,072 yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka  $H_3$  ditolak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa secara parsial motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dikenal juga dengan uji serentak atau uji model, yaitu pengujian yang digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya (Ferdinand, 2014).

*Yusriwati-Susanti, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Silmultan (Uji-F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	529.827	3	176.609	12.244	.000 <sup>b</sup>
	Residual	605.826	42	14.424		
	Total	1135.652	45			

a. *Dependent Variable:* Kualitas Laporan Keuangan Daerah

b. *Predictors:* (Constant), SAP Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern, Motivasi Kerja

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui hasil ANOVA (*analysis of variance*) atau uji F menunjukkan bahwa hasil nilai  $F_{hitung}$  sebesar 12,244 lebih besar dari  $F_{tabel} = 2,82$  dan dapat dilihat juga bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan  $\alpha = 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SAP berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang artinya  $H_4$  diterima.

**c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.683 <sup>a</sup>	.467	.428	3.798

a. Predictors: (Constant), SAP Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern, Motivasi Kerja

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber : Data Olahan SPS 26,2021

Dari tabel di atas menunjukkan hasil bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,428 artinya adalah bahwa terdapat sebanyak 42,8% pengaruh variabel Penerapan SAP Berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan sisanya sebesar 57,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau diteliti dalam penelitian ini.

**4.2 Pembahasan**

**1. Pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, variabel SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  3,242 sedangkan  $t_{tabel}$  2,018. Sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (3,242>2,018) dengan signifikansi untuk variabel SAP Berbasis Akrua 0,002 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial variabel dari penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hal ini terjadi dikarenakan para pegawai berhasil menerapkan SAP berbasis akrual dengan baik sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, dimana hal tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Selain itu juga dengan keberhasilan yang dicapai oleh para pegawai tersebut dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas, tidak terlepas dari semakin tepatnya program-program yang diberikan oleh pemerintah daerah baik berupa seminar atau panduan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Holle (2019), yang menyatakan bahwa para pegawai di lingkungan pemerintah daerah telah mempunyai pemahaman yang cukup mengenai penerapan dari standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sehingga tentunya berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

**2. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  1,358



sedangkan  $t_{tabel}$  2,018. Sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,358 < 2,018$ ) dengan signifikansi untuk variabel sistem pengendalian intern 0,182 yang artinya lebih besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga bisa dikatakan bahwa  $H_2$  ditolak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa secara parsial sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman para pegawai terhadap sistem pengendalian intern yang dilakukan dilingkup pemerintah daerah. Selain itu juga faktor dari berbedanya struktur organisasi yang ada di tiap-tiap OPD di Kabupaten Inhil menyebabkan sulitnya pengawasan dan pengendalian secara penuh dan efektif terhadap para pegawai khususnya dalam menyusun laporan keuangan daerah sehingga memungkinkan adanya kesalahan-kesalahan lainnya.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Holle (2019), yang menyatakan bahwa dengan semakin baiknya sistem pengendalian intern yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah maka akan membantu menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

### 3. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, variabel motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  1,843 sedangkan  $t_{tabel}$  2,018. Sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,843 < 2,018$ ) dengan signifikansi untuk variabel Motivasi Kerja 0,072 yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka  $H_3$  ditolak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa secara parsial motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan faktor dari para pegawai yang kurang termotivasi dan kurang bergairah dalam menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Faktor lainnya yang menjadi penentu adalah para pegawai yang merasa lingkungan ditempat kerjanya kurang memberikan semangat dan juga dorongan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak yang buruk, karena untuk membuat suatu laporan keuangan daerah yang berkualitas tentu memerlukan para pegawai yang termotivasi dan mempunyai dorongan semangat yang tinggi sehingga dapat memberikan kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Holle (2019), yang menyatakan bahwa para pegawai yang memiliki motivasi, dorongan dan niatan yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

### 4. Pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akruar, Sistem Pengendalian Intern, dan Motivasi Kerja secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara simultan variabel penerapan SAP berbasis akruar, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 12,244 lebih besar dari  $F_{tabel} = 2,82$  dan dapat dilihat juga bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan  $\alpha = 0,05$ . maka  $H_4$  diterima. Sehingga bisa disimpulkan bahwa secara simultan penerapan SAP berbasis akruar, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh seluruh variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan apabila OPD mampu memberikan arahan yang baik dan terorganisir terhadap pegawainya sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dari OPD yakni menghasilkan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk membantu proses terciptanya suatu laporan keuangan daerah yang baik maka dibutuhkan adanya pelatihan atau pemberian edukasi yang lebih terhadap para pegawai yang memiliki kaitan dalam menghasilkan laporan keuangan daerah. Selain itu diperlukan sistem pengendalian intern yang lebih terstruktur, sehingga para pegawai yang ada di lingkungan pemerintah daerah khususnya pada bagian keuangan dapat mendukung terciptanya pengelolaan laporan keuangan daerah yang efektif dan efisien agar tidak terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang didukung oleh telaah pustaka dan data yang telah diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan SAP berbasis akruar, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Penerapan SAP berbasis akruar berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
4. Motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil uji dalam penelitian yang telah dilakukan ini, maka peneliti merangkum beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, agar mengoptimalkan kembali sistem pengendalian intern pemerintah daerah dengan melakukan perbaikan secara berkala. Terlebih dengan di optimalkannya sistem pengendalian intern, tentunya membantu pemerintah daerah khususnya para pegawai yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan daerah untuk lebih terarah dalam melakukan pekerjaannya, sehingga nantinya penerapan dari SAP berbasis akrual yang termuat dalam PP No. 71 Tahun 2010 dapat berjalan dengan baik dan optimal. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan upaya atau cara untuk meningkatkan kembali motivasi kerja kepada para pegawainya khususnya di sektor keuangan. Hal ini diharapkan agar nantinya para pegawai sektor keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dan transparan.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel penelitian dikarenakan berdasarkan hasil penelitian ini, masih terdapat sekitar 57,2% pengaruh dari variabel lainnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk peneliti selanjutnya juga disarankan memperluas objek penelitian, sehingga tidak hanya meneliti pada OPD di Kabupaten saja tetapi juga pada OPD di Provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faria, J.A., dan Silva, S.M.G. 2013 *The Effects of Information Asymmetry on Budget Slack: An Experimental Research*. African Journal of Business Management vol 7(13), pp. 1086-1079.
- Ferdinand, A. 2014. *Metode penelitian manajemen (5th ed.)* Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Holle, Vania Annisa. 2019. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua)*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Universitas Cendrawasih. Vol. 14, No. 1. Mei (2019): 16-35.
- Kiranayanti, Enny dan Adi Erwati. 2016. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.16.2. Agustus (2016): 1290-1318.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Maslow, Abraham H. 1994. *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. PT PBP. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta
- Rahmawati, Neni. 2016. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*.
- Setiawan, I Wayan dan Gayatri. 2017. *Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober (2017): 671-700, 21, 671–700.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual. Pendekatan Teknis Sesuai PP No.71/2010*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, Evi. 2015. *Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan Organisasi Sektor Publik dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya)*. Jurnal Nominal Volume IV Nomor 1
- Warsito, Kawedar. 2010. *Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern*. Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol. 6 No. 1.
- Widari, L., & Sutrisno. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. 5(10), hal 117–126.
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2017, Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (2017). Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*. Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah* (2013). Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah* (2016). Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* (2008). Indonesia.

Yusriwati-Susanti, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan* (2010). Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (2004). Indonesia  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003). Indonesia.